



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Tenaga Honorer Berpeluang Diangkat Jadi PNS

Tak Ada Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan Pemkot Jogja

Pemerintah Pusat memutuskan menghapus tenaga honorer mulai Tahun Anggaran (TA) 2023. Kebijakan itu juga bakal berimbas ke daerah. Sampai saat ini sebanyak 2.952 tenaga honorer yang mengabdikan di Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.

MEREKA merupakan tenaga non pegawai negeri sipil (PNS). Statusnya ada yang tenaga bantu (naban) maupun tenaga teknis. "Dari hasil koordinasi kami beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer di lingkungan pemkot," tegas Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra kemarin (23/2).

Komisi A beberapa waktu lalu telah mengundang beberapa kepala OPD. Mereka diundang khusus rapat kerja membahas masalah tersebut. Rapat kerja itu dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dedi Budiono, Kepala Bagian Organisasi Patricia Heny Dian Anitasari dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jogja Nindyo Dewanto. Rapat kerja itu, terang Candra, menyimpulkan sejumlah hal. Di antaranya soal tiadanya pemutusan hubungan kerja tenaga honorer. "Baik itu pada TA 2023 maupun selanjutnya," tegas Candra.

Munculnya wacana penghapusan tenaga honorer sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah (PP)



FOTO: FOTO KUBRO SUTOMO/RADAR JOGJA



AKTIF TURBA: Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra (kiri) saat mengadakan kunjungan lapangan belum lama ini. Komisi A telah mengundang beberapa kepala OPD untuk rapat membahas penghapusan tenaga honorer mulai 2023.

selama bertahun-tahun.

Setidaknya ada solusi yang dibahas. Pertama, menjelang 2023 mereka terbuka ikut seleksi menjadi PNS melalui status PPPK. Kedua, pemkot menjamin kepastian status mereka dengan payung hukum yang pasti sehingga tidak merugikan hak-hak mereka.

Di sisi lain pemerintah tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) besar-besaran pada tahun ini. Namun pemerintah membuka CPNS untuk tenaga honorer. Pemerintah akan membuka kesempatan bagi tenaga honorer menjadi PNS.

Ini menyusul kebijakan pemerintah yang menetapkan dua jenis pegawai pemerintah, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu, untuk memfasilitasi tenaga honorer yang masih ada di instansi pemerintah, akan dibuka kesempatan menjadi CPNS.

Pt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) Mohammad Averrouce mengatakan, tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi.

Setelah menjadi CPNS, tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peperikanan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. (*/kus/rg)

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai non-ASN di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun atau 2023.

Setelah itu, tenaga honorer dihapus. Pegawai pemerintah mulai 2023 hanya ada dua jenis. Yakni

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya disebut sebagai

Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Candra, maksud dari kebijakan itu adalah penghapusan status honorer. Bukan pekerjaannya. Dewan bersama pemkot telah merumuskan seluruh pegawai Non-ASN akan beralih status menjadi pekerja kontrak. Alih status ini mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan.

Terkait dengan skema alih status itu, dewan bersama pemkot bakal berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PAN/RB) guna menyusun aturan penerimaan calon ASN. Konsultasi ini dimungkinkan untuk menerima pegawai honorer yang memenuhi syarat untuk ikut seleksi ASN.

Candra sepakat para tenaga honorer yang telah lama mengabdikan itu dapat ikut seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) yang disesuaikan dengan analisis jabatan di pemkot. Pihaknya ingin ada kemudahan syarat bagi tenaga honorer.

Bila dikategorikan dari bidang kerja, tenaga honorer terbanyak tersebar di bidang kesehatan dan pendidikan. Banyak guru dan tenaga kesehatan berstatus honorer. Mereka telah bekerja



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005